



E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://epaper.dpr.go.id>

Judul : Komisi V DPR: Program Bedah Rumah Jangan Hanya Andalkan Data BPS
Tanggal : Jumat, 12 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 1

Komisi V DPR: Program Bedah Rumah Jangan Hanya Andalkan Data BPS
Reporter : MENTARI KUSUMA W
Editor : FAQIH MUBAROK
Parlemen

facebook sharing buttontwitter sharing buttonwhatsapp sharing buttonemail sharing buttonsharethis sharing button
Jumat, 12 September 2025 21:33 WIB

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Edi Purwanto. Foto: Istimewa

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Edi Purwanto. Foto: Istimewa

A+ A-

RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Edi Purwanto menyoroti mekanisme pendataan penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah yang dijalankan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Menurutnya, jika Pemerintah hanya mengandalkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) berupa Data Terpadu Sensus Ekonomi Nasional (DT SEN) yang dilakukan setiap lima tahun sekali, maka permasalahan akurasi data penerima BSPS tidak akan terselesaikan.

"Kalau memang serius, sebenarnya bisa dilakukan data yang paling akurat, apa itu? Data diambil dari desa tapi ditandatangani kepala desa, ditandatangani BPD, ditandatangani Bhabinkamtibnas, ditandatangani Babinsa, jadi seluruh Forkopimdes menandatangani kaitan dengan data itu sehingga clear," kata Edi Purwanto dalam rapat dengar pendapat Komisi V DPR dengan Eselon I Kementerian PKP, Kementerian Transmigrasi, dan BMKG, Selasa (9/9/2025).

Baca juga : Komisi V DPR: Banjir Bali Alarm Keras Benahi Mitigasi Dan Tata Ruang

Edi menekankan, pelibatan Pemerintah desa serta unsur Forkopimdes akan membuat data penerima bantuan lebih valid. Karena langsung diverifikasi di lapangan oleh pihak yang memahami kondisi masyarakat setempat.

"Dengan begitu, program BSPS bisa benar-benar menysasar masyarakat yang membutuhkan," imbuhnya.

Sebelumnya, anggota Komisi V DPR Fraksi NasDem Mori Hanafi menyoroti kecepatan verifikasi program BSPS. Dia menilai, dengan target renovasi mencapai 400 ribu unit rumah, Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan mekanisme lama yang lambat.

Baca juga : Akademisi UI: Jaga Marwah Demokrasi, Jangan Terjebak Propaganda Khilafah

"Meningkatkan jumlah BSPS hampir 10 kali lipat, tidak kah bapak berpikir proses verifikasi harus lebih cepat? Karena yang 2025 aja yang hanya 40 ribuan ini baru bisa berjalan bulan-bulan ini, verifikasi di lapangan ya," katanya.

"Usulan kami, supaya ini bisa terserap maka verifikasi harus dipercepat kalau tidak kami khawatir ini tidak akan terserap dengan baik pada tahun 2025," ucap Mori.

Dengan berbagai masukan itu, Komisi V DPR menekankan perlunya pembenahan menyeluruh dalam program BSPS, baik dari aspek data, verifikasi, maupun kriteria penerima.

Baca juga : Khidmat Di Banyuwangi, Doa Bersama 7 Hari Wafatnya Alm Affan Kurniawan

Hal ini diharapkan agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang paling membutuhkan.

<https://rm.id/baca-berita/parlemen/281114/komisi-v-dpr-program-bedah-rumah-jangan-hanya-andalkan-data-bps>